

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan negara masih dalam tahap reformasi yang berkelanjutan, sejak tahun 2003 dimulai dengan dikeluarkannya Undang-Undang di bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, dilanjutkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Undang-undang inilah yang mendasari pengelolaan keuangan negara dan mengacu pada *international best practices*. Setelah Undang-undang tersebut, selanjutnya bermunculan beberapa peraturan pemerintah yang pada intinya bertujuan untuk mewujudkan *good government governance*, terutama yang berkaitan dengan masalah keuangan. Salah satu bentuk usaha berkelanjutan yang disebutkan adalah dengan menetapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Keinginan untuk mewujudkan *good governance* merupakan salah satu pokok agenda yang diharapkan dapat secara konsisten dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Salah satu titik berat yang diharapkan yaitu dalam pengelolaan keuangan daerah, tuntutan adanya akuntabilitas laporan keuangan yang dihasilkan, dan agar para *shareholder* dapat ikut serta mengawasi dan memperbaiki kinerja pemerintah. (Mardiasmo, 2009)

Adanya penetapan PP No. 71 Tahun 2010 maka penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Hal ini berarti bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual dan harus dilaksanakan selambat-lambatnya tahun 2015. Hal ini sesuai dengan Pasal 32 UU No. 17 tahun 2003 yang mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP.

Ahmad Zaidin, 2017

PENGARUH EFEKTIVITAS SIPKD, IMPLEMENTASI SAP BERBASIS AKRUAL DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

Tabel 1.1
Strategi Penerapan SAP Berbasis Akruial secara Bertahap di Indonesia

2010	a. Penerbitan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual b. Mengembangkan <i>Framework</i> akuntansi berbasis akrual
2011	a. Penyiapan aturan pelaksanaan dan kebijakan akuntansi b. Pengembangan sistem akuntansi dan TI bagian pertama (proses bisnis dan <i>detail requirement</i>) c. Pengembangan kapasitas SDM
2012	a. Pengembangan sistem akuntansi dan TI (lanjutan) b. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2013	a. <i>Ploting</i> beberapa KL dan BUN b. <i>Review</i> , evaluasi dan konsolidasi seluruh laporan keuangan c. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2014	a. <i>Pararel Run</i> dan konsolidasi seluruh laporan keuangan b. <i>Review</i> , Evaluasi dan konsolidasi seluruh laporan keuangan c. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2015	a. Implementasi penuh b. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)

Sumber: KSAP

Penerapan akrual basis di sektor publik ini telah diterapkan oleh beberapa negara di dunia. Negara pertama yang menerapkan akrual basis di sektor publik merupakan New Zealand. Pada akhir tahun 1980-an sampai awal tahun 1990-an New Zealand pada manajemen pemerintahannya telah melakukan reformasi besar. Penggunaan basis akrual telah menjadi salah satu dari praktik manajemen keuangan modern (sektor publik). Pengalaman New Zealand menunjukkan bahwa perubahan bukan sekedar wacana ataupun retorika tetapi sudah menjadi keberhasilan yang baik. Hasil dari sisi keuangan menunjukkan bahwa setelah selama 20 tahun mengalami defisit (anggaran), kemudian berubah secara mengejutkan menjadi surplus dalam tiga tahun terakhir (1994-1996), dengan sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa surplus tersebut lebih dari sekedar sebuah siklus (Mulyana, 2009).

Selain New Zealand terdapat beberapa negara lain yang telah menerapkan SAP akrual basis. Australia dan Inggris misalnya, kedua negara ini juga merupakan negara yang telah menerapkan akrual basis tersebut. Pemerintah

Ahmad Zaidin, 2017

PENGARUH EFEKTIVITAS SIPKD , IMPLEMENTASI SAP BERBASIS AKRUAL DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Australia sebelum tahun 1990 menggunakan basis modifikasi kas (*cash modified*) untuk penganggaran pelaporan dan keuangan. Kemudian Inggris sendiri dalam penerapan SAP berbasis akrual, pemerintah Inggris telah menerapkannya pada tahun 2000 untuk individual departemen/lembaga dan pada tahun 2006 untuk menerapkan laporan keuangan konsolidasi. Selain itu, Inggris beralih ke sistem manajemen berbasis sumber daya (*resource-based*) atau *accrual-based* sejak April 2001. Pemerintah Inggris ditempatkan sebagai negara maju dalam reformasi manajemen keuangan sektor publik dengan dilakukannya peralihan ini. Inggris dinyatakan sebagai negara *pioneer* yang mengimplementasikan *accrual-based budgeting* karena Inggris diklaim sebagai “tanah kelahiran” *New Public Management* (Athukorala dan Reid, 2003).

Untuk di Asia sendiri terdapat beberapa negara yang sedang menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual, dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual tersebut terdapat kendala-kendala atau hambatan pada awal penerapannya. Di Malaysia misalnya, seperti di banyak negara berkembang terdapat kendala berupa masih kurangnya tenaga akuntan yang berkualitas dan profesional. Pada kasus pemerintah Malaysia belum memberikan insentif bagi staf akuntansinya yang dimaksud dengan Insentif ini meliputi biaya tahunan serta beasiswa bagi akuntan pemerintah untuk mengikuti kursus untuk meningkatkan kualifikasi akuntansi profesional (Saleh and Pendlebury, 2006).

Negara Estonia berbeda dengan Malaysia pada negara ini sudah ada kualifikasi pelatihan untuk para akuntan. Kemudian staf dari Kementrian Auditor Pemerintah dan anggota parlemen membutuhkan pelatihan di bidang akuntansi keuangan (Juta Tikk, 2010). Pada pulau Fiji juga ditemukan masih terdapat terlalu banyak ketergantungan pada konsultan internasional sehingga menyebabkan membengkaknya biaya. Rendahnya keterampilan dasar para akuntan publik juga menjadi suatu hambatan dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Fiji (Geoffrey Tickell, 2010).

Di Indonesia sendiri penerapan SAP akrual basis ini juga masih memiliki kendala-kendala maupun hambatan dalam proses penerapannya. Kendala utama yang sama dengan negara lainnya dalam penerapan SAP akrual basis ini yaitu

Ahmad Zaidin, 2017
PENGARUH EFEKTIVITAS SIPKD , IMPLEMENTASI SAP BERBASIS AKRUAL DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

kompetensi sumber daya manusia yang belum memadai dan masih belum sepenuhnya teknologi informasi maupun aplikasi yang membantu dalam pencatatan akuntansi.

Terkait dengan Sumber daya manusia, kendalanya adalah latar belakang pendidikan dimana kebanyakan para pegawai yang diberi kewenangan mengelola keuangan negara bukan berlatar belakang pendidikan akuntansi sehingga menyebabkan pemahaman dan pengimplementasian PP No. 71 Tahun 2010 menjadi kurang maksimal. Pentingnya sumber daya manusia di bidang akuntansi dan keuangan juga dijelaskan dalam hasil wawancara Agus Hermawan dengan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan pada Senin, 9 November 2015 yang mengatakan:

"Kami akan pastikan di kabupaten/kota dan seluruh OPD harus ada SDM yang memiliki kemampuan untuk membuat pelaporan. Saya sampai ke kesimpulan bahwa laporan keuangan saat ini atau akrual base itu hanya bisa dibuat oleh seorang akuntan, oleh karena itu mutlak diperlukan orang punya keahlian akuntansi, seorang akuntan lebih disukai, jadi di tiap OPD dan kabupaten/kota di Provinsi ada. Jadi untuk SDM kita harus menyiapkan bahwa semua OPD harus ada akuntannya yang berkewajiban membuat laporan terkait laporan keuangan. Bisa PNS bisa juga konsultan, tapi lebih baik konsultan resmi," jelas Heryawan. (<http://www.galamedia.com/>: 22 Januari 2015).

Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memerhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan (KSAP, 2006, hlm.3). Perubahan perlakuan akuntansi pemerintah menuju basis akrual akan membawa dampak walau sekecil apapun. Perubahan menuju arah yang lebih baik ini bukan berarti hadir tanpa masalah. Pro-kontra mengenai siap dan tidak siapkah pemerintah daerah dengan penerapan SAP berbasis akrual ini akan terus timbul. Hal yang paling sering muncul adalah terkait kompetensi sumber daya manusia dan penerapan IT yang masih kurang maksimal. Sumber daya manusia yang kurang memadai menjadi masalah klasik dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam Ardiansyah (2012) menyebutkan bahwa penelitian yang dilakukannya berhasil

Ahmad Zaidin, 2017

PENGARUH EFEKTIVITAS SIPKD, IMPLEMENTASI SAP BERBASIS AKRUAL DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

menemukan bukti adanya pengaruh kualitas sumber daya manusia dan komunikasi terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual.

Salah satu wujud dari keberhasilan pemerintah yaitu dengan mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang berkualitas sehingga informasi akuntansi yang diberikan juga berkualitas, LKPD dianggap baik jika mendapat opini wajar tanpa pengucualian, sejak diberlakukannya otonomi daerah setiap pemerintah daerah, baik pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi diwajibkan menerbitkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban telah berakhirnya tahun anggaran dan wajib diaudit oleh BPK (Ketut,2009).

Dari laporan hasil pemeriksaan BPK tahun 2016 atas tahun anggaran 2015 Kenaikan opini dari WDP menjadi WTP pada 84 LKPD dan dari TW/ 81 IHPS I Tahun 2016 BAB II - Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah TMP menjadi WDP pada 17 LKPD disebabkan karena pemda telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK tahun 2014 dengan melakukan perbaikan atas kelemahan sistem pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga akunakun disajikan dan diungkapkan sesuai dengan SAP.Selain kenaikan opini, terdapat penurunan opini atas 30 LKPD Tahun 2015 yaitu dari WTP menjadi WDP pada 19 pemda, dari WDP menjadi TMP pada 8 pemda, dari WDP menjadi TW pada 2 pemda yaitu Pemda Tana Toraja dan Pemkab Konawe Utara, dan dari WTP menjadi TW pada Pemkab Barru setelah sebelumnya selama 2 tahun berturut-turut memperoleh opini WTP (<http://www.bpk.go.id> : diakses 9 Januari 2017).

Tabel 1.2
Opini Hasil Pemeriksaan atas LKPD di pemerintah daerah
jawa barat oleh BPK

No	Daerah	Opini Tahun 2011	Opini Tahun 2012	Opini Tahun 2013	Opini Tahun 2014	Opini Tahun 2015
1	Prov.Jawa Barat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Kab.Bandung	WDP	WDP	TMP	WDP	WDP
3	Kab.Bandung Barat	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
4	Bekasi	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
5	Kab.Bogor	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
6	Kab.Ciamis	WDP	WDP	WTP DPP	WTP	WTP
7	Kab.Cianjur	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
8	Kab.Cirebon	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
9	Kab.Garut	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
10	Kab.Indramayu	WDP	WDP	TMP	WDP	WTP

Ahmad Zaidin, 2017

PENGARUH EFEKTIVITAS SIPKD , IMPLEMENTASI SAP BERBASIS AKRUAL DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

11	Kab. Karawang	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
12	Kab. Kuningan	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
13	Kab. Majalengka	WDP	WDP	WTP DPP	WTP	WTP
14	Kab. Pangandaran				WDP	WDP
15	Kab. Purwakarta	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
16	Kab. Subang	WDP	WDP	WDP	TMP	TMP
17	Kab. Sukabumi	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
18	Kab. Sumedang	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
19	Kab. Tasikmalaya	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
20	Kota Bandung	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
21	Kota Banjar	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
22	Kota Bekasi	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
23	Kota Bogor	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
24	Kota Cimahi	WDP	WDP	WTP DPP	WTP	WTP
25	Kota Cirebon	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
26	Kota Depok	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
27	Kota Sukabumi	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
28	Kota Tasikmalaya	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP

Sumber : IHPS semester 1 2016

BPK RI Perwakilan Jawa Barat telah memberikan LHP atas LKPD 2015 kepada 27 pemerintah daerah. Dari laporan tersebut pemerintah daerah yang mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, dan Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Sukabumi. Selain itu, untuk Kabupaten Karawang, Kota Tasikmalaya dan Kota Bandung masih memperoleh WDP sama halnya dengan tahun lalu. Dari rekapitulasi 27 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat yang telah diserahkan LHP atas LKPD tahun anggaran 2015 hingga senin terdapat 19 pemerintah daerah meraih WTP dan 7 daerah lainnya meraih WDP sedangkan terdapat 1 daerah yaitu kabupaten subang yang memperoleh TMP atau *disclaimer*. (<http://www.bpk.go.id> : diakses 9 Januari 2017).

Untuk menilai kesiapan pemerintah pusat dalam menerapkan SAP berbasis akrual dan menghasilkan laporan keuangan berbasis akrual tahun 2015, pada 2014 BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas upaya tersebut. Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa upaya yang telah dilakukan pemerintah pusat belum sepenuhnya efektif untuk mendukung pelaporan keuangan berbasis

Ahmad Zaidin, 2017

PENGARUH EFEKTIVITAS SIPKD , IMPLEMENTASI SAP BERBASIS AKRUAL DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

akrual. Sebagian besar permasalahan yang terungkap dalam pemeriksaan hingga kini belum selesai ditindaklanjuti. Permasalahan itu antara lain belum dimilikinya kebijakan akuntansi untuk pengelolaan perpajakan dan penerimaan migas, serta belum dapat dimanaftkannya aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) secara terintegrasi. (<http://www.pontianak.bpk.go.id/>: diakses 13 Januari 2017)

Dalam pemberian pendapat BPK tentang kesiapan pemerintah dalam pelaporan keuangan berbasis akrual ini, pokok masalah meliputi:

1. Belum ada strategi komprehensif dalam penerapan pelaporan keuangan berbasis akrual.
2. Ketidakjelasan kebijakan mengenai penyajian kembali laporan keuangan tahun 2014 berbasis akrual.
3. Ketidaksiapan SDM dan sistem aplikasi untuk mendukung penerapan pelaporan keuangan berbasis akrual.
4. Belum lengkapnya perangkat regulasi yang digunakan pemerintah dalam penerapan pelaporan keuangan berbasis akrual.
5. Belum dilaksanakannya penilaian mandiri atas pengendalian (control selfassessment/ CSA) sebagai strategi penguatan instrumen pengendalian intern dalam pelaporan keuangan.

Untuk pemda, sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK terhadap 109 pemda, dijumpai sebanyak 35 (32,11%) pemda telah menyusun strategi dan 74 (67,89%) pemda tidak menyusun strategi dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual yang dimaksud. (<http://www.pontianak.bpk.go.id/>: diakses 13 Januari 2017). Pemda juga telah menganggarkan pelatihan dan pengembangan SDM dalam penerapan SAP berbasis akrual. Namun, BPK menemukan permasalahan-permasalahan SDM pada pemda sebagai berikut. (<http://www.pontianak.bpk.go.id/>: diakses 13 Januari 2017)

- a) Perencanaan kebutuhan kompetensi dan pelatihan SDM yang menangani fungsi pengelola keuangan, aset, dan TI tidak dilakukan. Dari

Ahmad Zaidin, 2017

PENGARUH EFEKTIVITAS SIPKD , IMPLEMENTASI SAP BERBASIS AKRUAL DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

109 pemda, sebanyak 89 (81,65%) pemda tidak merencanakan kebutuhan kompetensi untuk tugas dan fungsi pengelola keuangan, aset dan TI serta Inspektorat selaku pereviu LKPD. Sebanyak 88 (80,73%) pemda tidak memiliki data base SDM yang lengkap dan mutakhir.

b) Penempatan SDM pengelola keuangan, aset, dan TI tidak sesuai dengan bidangnya. Sebanyak 85 (77,98%) pemda melakukan penempatan pegawai pengelola keuangan, aset dan TI tanpa mempertimbangkan tugas, fungsi dan kompetensi sebagai pengelola keuangan, aset dan TI. Selain itu, sebanyak 96 (88,07%) pemda belum memiliki dan menerapkan kebijakan yang mengatur tentang mutasi dan promosi pegawai yang mendukung penerapan SAP berbasis akrual. Pemda menerapkan kebijakan promosi dan mutasi hanya untuk mengisi kekosongan jabatan dan belum mengaitkan hal tersebut dengan kebutuhan jumlah dan kompetensi SDM dalam rangka mendukung penerapan SAP berbasis akrual. Bahkan pegawai yang telah mengikuti pelatihan SAP berbasis akrual dimutasi ke unit kerja yang tidak terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan.

c) Pelatihan/ sosialisasi SDM terkait dengan penerapan SAP berbasis akrual belum memadai. Sebanyak 81 pemda (74,31%) tidak merencanakan kebutuhan pelatihan SDM, sehingga sebagian pelatihan yang dilaksanakan oleh pemda tidak bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi SDM pengelola keuangan, aset dan TI, serta Inspektorat selaku pereviu LKPD.

Sistem aplikasi yang digunakan belum sepenuhnya dapat menghasilkan laporan keuangan yang valid, akurat, dan sesuai dengan SAP berbasis akrual. Selain permasalahan proses pemetaan akun dan input data yang belum selesai, sistem aplikasi yang digunakan pemda juga belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pencatatan transaksi sesuai dengan yang diatur dalam kebijakan akuntansi. Hal ini antara lain terjadi pada (i) aplikasi SIPKD yang tidak menyediakan fasilitas menu untuk meng-input saldo awal neraca, (ii) aplikasi SIMDA Barang yang tidak dapat menghitung penyusutan aset tetap yang

Ahmad Zaidin, 2017
PENGARUH EFEKTIVITAS SIPKD , IMPLEMENTASI SAP BERBASIS AKRUAL DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

mengalami renovasi, dan (iii) aplikasi SIMDA Keuangan yang belum mampu mengakomodasi penyajian piutang dan persediaan serta beban yang terkait, sehingga pemda perlu melakukan penyesuaian signifikan pada akhir tahun pada saat menyusun laporan keuangan tahunan.

Kelemahan sistem aplikasi yang digunakan pemda juga terkait dengan permasalahan integrasi horisontal antarbeberapa sistem yang digunakan, yang mengharuskan pemda untuk melakukan input ulang data atau input jurnal secara berkala (batch). Hal ini sangat memengaruhi kualitas penyajian laporan keuangan, ditandai dengan neraca yang belum seimbang dan hubungan saldo antarlaporan keuangan yang belum sepenuhnya valid (<http://www.pontianak.bpk.go.id/>: diakses 13 Januari 2017). Fenomena tentang sistem aplikasi atau Teknologi informasi yang digunakan pemerintah dan kualitas SDM yang masih kurang memadai sering dikaitkan dengan kualitas informasi keuangan yang akan diperoleh dan juga sering dikaitkan dengan bagaimana pelaporan akuntansi berbasis akrual. Rendahnya kualitas laporan keuangan, secara umum disebabkan penyusunan laporan keuangan yang belum memenuhi standar akuntansi pemerintah dan kurang ditaatinya ketentuan perundangan dari pemeriksaan BPK. Banyak temuan berulang dari tahun ke tahun, tanpa ada keterangan bahwa temuan itu sudah ditindak lanjuti oleh pemda, temuan BPK juga menunjukkan sebagian besar laporan keuangan pemda mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) bermasalah pada pencatatan aset/barang milik daerah, umumnya hal itu terjadi karena pencatatan keberadaan fisik dan pengungkapannya dalam laporan belum memadai. Sistem harus dibangun sedemikian rupa disertai *reward* dan *punishment* yang jelas untuk mendorong ketertiban pengelolaan laporan, pentingnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola laporan keuangan, peningkatan kualitas SDM khususnya lulusan akuntansi sangat diperlukan agar dapat menghasilkan laporan keuangan pemda yang ideal dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (Tahria Syfrudin, 2012).

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kapasitas sumber daya manusia mempunyai nilai capaian yang tinggi yaitu sebesar 48,10% sedangkan

Ahmad Zaidin, 2017

PENGARUH EFEKTIVITAS SIPKD , IMPLEMENTASI SAP BERBASIS AKRUAL DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

pemanfaatan teknologi informasi sebesar 38,30% berdasarkan pengolahan data statistik sehingga dapat dikatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia maupun pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi keterandalan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. (Wiwik Andriani,2014).

Untuk Kabupaten Subang sendiri perolehan opini TMP (*disclaimer*) dari BPK 2 tahun secara berturut –turut dan hal tersebut disebabkan oleh beberapa kesalahan .

SUBANG– Kabupaten Subang langganan opini disclaimer atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Penilaian ini merupakan kedua kali berturut-turut setelah sebelumnya di 2014 lalu. Di 2015 juga mendapat penilaian (opini) yang sama dari BPK.

“Kalau di 2014, sistem pelaporan keuangannya yang salah, sekarang penyebabnya kesalahan sistem administrasi, ”ungkap Imas, kepada Wartawan KORAN SINDO. Menurut politisi senior Partai Golkar ini, ada sejumlah SKPD (satuan kerja perangkat daerah) berkinerja buruk akibat tidak memiliki perangkat sumber daya manusia (SDM) berkualitas, yang berpengaruh menyebabkan Subang dua kali meraih opini disclaimer secara berturut-turut. SKPD-SKPD berkinerja dan mempunyai SDM yang buruk tersebut, terancam mendapat sanksi tegas, dan pejabatnya akan segera diberhentikan atau diganti.

“Memang, ada beberapa OPD (organisasi perangkat daerah) yang kinerjanya bu - ruk, SDM-nya enggak mumpuni. Aki batnya, berturut-turut dapat disclaimer. Mereka harus di benahi, kami siapkan sanksi tegas. Kalau perlu, pejabatnya ya dimutasi” Tegasnya. (<http://www.sindo.co.id>)

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh Kabupaten Subang sendiri dikatakan masih belum sesuai dengan aturan yang berlaku, dimana hal tersebut jika dikaitkan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa salah satu laporan keuangan yang dalam hal ini laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila memenuhi karakteristik yaitu relevan dimana informasi akuntansi dikatakan relevan apabila memenuhi syarat lengkap dengan arti informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. Untuk opini BPK atas LHP Kabupaten Subang tersebut menyatakan bahwa laporan keuangan yang disampaikan belum dapat dikatakan lengkap dikarenakan masih terdapat pencatatan yang dilakukan secara tidak rinci dan software pencatatan yang masih

Ahmad Zaidin, 2017

PENGARUH EFEKTIVITAS SIPKD , IMPLEMENTASI SAP BERBASIS AKRUAL DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

kurang maksimal serta kemampuan dari SDM yang berada di SKPD yang masih kurang dari harapan.

Namun terjadi perubahan pada tahun 2016 dimana hasil pemeriksaan dari BPK atas Laporan Keuangan Kabupaten Subang mengalami kenaikan menjadi WDP.

SUBANG – Setelah dua tahun mendapatkan hasil pelaporan disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), akhirnya pada pelaporan anggaran tahun 2016 meningkat menjadi penilaian dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP),

Nilai ini diakui oleh Badan Pengelola Keuangan (BPKD) didapat dengan jerih payah yang ekstra walaupun dengan 6 poin pengecualian. Pelaporan tersebut diterima langsung oleh Bupati Subang Hj. Imas Aryunningsih dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Subang Hendra Purnawan yang diserahkan oleh Ketua Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat Arman Syfa di Gedung Perwakilan BPK Prov Jabar, Jl. Moh. Toha Bandung, Kamis (16/6/2017).

Ketua Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat Arman Syfa mengatakan, proses pengauditan kabupaten Subang mendapat perhatian, dan pemeriksaan serta menjadi sorotan sejak dua tahun sebelumnya, karena berbeda dari Kabupaten atau kota lainnya sehingga tim pengaudit diperbolehkan melakukan koreksi, namun tidak semua karena ada mekanismenya.

“Dari laporan yang diberikannya pun Subang mempunyai pembahasan baling banyak, sehingga Subang menjadi kabupaten yang terakhir menerima hasil pelaporan. Jadi kesimpulannya Subang masih menyisakan beberapa aspek yang harus diperbaiki namun beberapa hal sudah dilaporkan baik, dan opininya wajar dengan pengecualian,” katanya.

“Intinya subang harus maju dan mendapatkan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), dan untuk tindak lanjut dari SDM yang dominan kurang mampu akan diberikan kedisiplin serta rasa tanggung jawab kepada orang yang ditunjuk, juga mencari pendampingan yang betul-betul mempunyai ketegasan dalam memberikan pendampingan, jadi marilah membangun Subang menjadi lebih baik, masa kabupaten lain bisa, kita tidak bisa, kuncinya dengan menjaga kekompakan dan kebersamaan seluruh dinas jangan ada yang acuh tak acuh,”(www.kotasubang.com)

Dapat dilihat adanya peningkatan dari kapasitas SDM dan sistem informasi di kabupaten subang menjadikan subang menjadi lebih baik dalam tata kelola keuangannya, Indra Bastian (2006, hlm.55) menyatakan bahwa penyiapan dan penyusunan laporan keuangan yang berkualitas memerlukan SDM yang menguasai akuntansi pemerintahan. SDM menjadi faktor kunci dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas karena yang menyusun laporan keuangan adalah mereka yang menguasai SAP. Betapapun bagusnya SAP, tanpa Ahmad Zaidin, 2017

PENGARUH EFEKTIVITAS SIPKD , IMPLEMENTASI SAP BERBASIS AKRUAL DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

didukung SDM yang handal dan sistem yang memadai maka laporan keuangan yang berkualitas sulit dicapai. Oleh karena itu, tugas yang berkaitan dengan akuntansi baik itu penyusunan laporan keuangan harus dikerjakan oleh seorang yang memiliki kompetensi dalam bidang keuangan.

P. Ayu Ratna Dewi dan Ni Putu Sri Harta Mimba(2014) menyatakanTingkat efektivitas penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Pemerintah Kota Denpasar secara keseluruhan termasuk dalam Kriteria Efektif (KE) serta berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kota Denpasar .

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Pada organisasi sektor publik khususnya organisasi pemerintahan merupakan entitas yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangannya kepada publik. Pemerintah adalah sebuah organisasi sektor publik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan merupakan pendorong serta fasilitator dalam keberhasilan pembangunan di suatu daerah (Handayani, 2010).

Organisasi sektor publik yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat juga harus dapat menyediakan sistem informasi yang bersifat interaktif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Tujuan dari pelaporan keuangan sektor publik adalah menyediakan informasi mengenai sumber daya, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan, menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya, menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam membiayai aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya, menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas dan perubahan yang terjadi, dan menyediakan informasi secara keseluruhan yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas menyangkut biaya jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan (Bastian, 2010, hlm.297).

Dewasa ini pergeseran paradigma kepada pemerintahan saat ini, cukup mendorong kita untuk mewujudkan suatu sistem tata pemerintahan yang baik (*good governmetn governance*), dengan cara mewujudkannyadengan melahirkan

Ahmad Zaidin, 2017
PENGARUH EFEKTIVITAS SIPKD , IMPLEMENTASI SAP BERBASIS AKRUAL DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

tata pemerintahan yang demokratis dan diselenggarakan secara baik, bersih, transparan, partisipatif serta akuntabilitas sehingga memiliki kredibilitas (Friska dkk: 2015). Demi mendukung terwujudnya *good governance* ini, pemerintah perlu melakukan perubahan-perubahan yang tentunya terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual sangat diperlukan sehingga pemerintah dapat menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, sehingga informasi akuntansi yang dihasilkan juga berkualitas dan akan membantu dalam pengambilan keputusan. Kemudian untuk mencapainya maka diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dan suatu sistem pengelolaan informasi yang baik pula dalam melaksanakan SAP berbasis akrual tersebut, sehingga pemerintah dapat memiliki tata kelola keuangan yang baik dan menghasilkan informasi yang berkualitas nantinya.

Penelitian Made Ayu Darmayani dkk (2014) pengaruh kualitas sumber daya manusia, penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (sipkd), dan pengendalian intern terhadap nilai laporan keuangan pada bagian keuangan setda kabupaten buleleng dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kualitas SDM, Penerapan SIPKD, dan pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap nilai laporan keuangan.

Penelitian lain yang mendukung, beberapa diantaranya yaitu penelitian I Made Ari Widyastuti dkk (2013) tentang pengaruh implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada pemerintah kota Bandung menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan.

Kemudian Ikrima Chikita dkk (2015) yang meneliti tentang pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kesiapan penerapan SAP Berbasis Akrual pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Denpasar dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil statistik yang dilakukan menunjukkan bahwa 77,4 persen kesiapan penerapan SAP berbasis akrual pada satuan kerja dalam lingkup pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi dipengaruhi oleh kualitas sumber daya

Ahmad Zaidin, 2017
PENGARUH EFEKTIVITAS SIPKD, IMPLEMENTASI SAP BERBASIS AKRUAL DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

manusianya yang tidak lain adalah pegawai-pegawai yang mengabdikan diri di satuan kerja yang bersangkutan.

Selanjutnya Dominggus Pirade dkk (2013) meneliti mengenai pengaruh penggunaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (sipkd) terhadap kinerja pegawai di kabupaten tana toraja menunjukkan kesimpulan bahwa persepsi kemanfaatan SIPKD, Persepsi kemudahan penggunaan SIPKD, Keahlian komputer berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai sedangkan kecemasan komputer berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pegawai diharapkan pelatihan terhadap pegawai pengguna SIPKD dapat dijadikan program dalam mempertahankan keahlian pengguna SIPKD dalam penelitian ini dapat terlihat bahwa sistem maupun kompetensi seorang operator dapat berpengaruh terhadap kinerja dan nantinya akan berimbas terhadap output yang ada yaitu laporan keuangan.

Kemudian Fadri Yanti (2015) yang meneliti tentang pengaruh pemahaman atas sistem keuangan daerah dan peran fungsional terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa pemahaman atas sistem akuntansi keuangan daerah dan peran pengawas fungsional secara bersama-sama berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Aceh, pemahaman atas sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Aceh.

Sesuai dengan beberapa penelitian di atas Dewi Andini dan Yusrawati (2015) menyimpulkan dari penelitiannya yang berjudul pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah bahwa kompetensi SDM dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Empat Lawang.

Fenomena penerapan SAP berbasis akrual ini sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut mengingat bahwa penerapan SAP berbasis akrual itu sendiri yang secara penuh baru diterapkan di awal tahun 2015 dan kualitas laporan keuangan yang dimana untuk LKPD yang masih mendapatkan opini WDP dan disclaimer

Ahmad Zaidin, 2017
PENGARUH EFEKTIVITAS SIPKD, IMPLEMENTASI SAP BERBASIS AKRUAL DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

dari BPK. Pemilihan Kabupaten Subang sebagai lokasi penelitian dikarenakan peneliti ingin mengetahui apakah benar adanya peningkatan dari penerapan Efektivitas SIPKD dan Implementasi SAP berbasis akrual dari SKPD kota tersebut dan apakah dari kota tersebut dapat meningkatkan ataupun mempertahankan opini lapkeu mereka kedepannya setelah penerapan SAP berbasis akrual dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang mendukung basis akrual dimana kita ketahui sebelumnya untuk kabupaten Subang sendiri dalam dua tahun berturut-turut memperoleh opini BPK TMP (tidak memberikan pendapat).

Berdasarkan uraian di atas penulis beranggapan perlu melakukan penelitian lebih dalam dengan judul penelitian **“Pengaruh Efektivitas SIPKD , Implementasi SAP berbasis Akrual dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Subang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah efektivitas sistem informasi keuangan daerah (sipkd) secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Apakah implementasi SAP berbasis akrual secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan ?
3. Apakah kompetensi sumber daya manusia secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan?
4. Apakah efektivitas sistem keuangan daerah ,kompetensi sumber daya dan Implementasi SAP berbasis akrual secara simultan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Ahmad Zaidin, 2017

PENGARUH EFEKTIVITAS SIPKD , IMPLEMENTASI SAP BERBASIS AKRUAL DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas sistem informasi keuangan daerah (sipkd) secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh implementasi SAP berbasis akrual secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan.
4. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas sistem keuangan daerah , kompetensi sumber daya dan Implementasi SAP berbasis akrual secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman praktis bagi peneliti dalam menerapkan teori yang telah di dapat selama berada di bangku perkuliahan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam lagi penelitian khususnya pada bidang keuangan di sektor publik.Selain itu, manfaat penelitian ini bagi pemerintah adalah dengan adanya hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan masukan terhadap pengembangan sarana dan standar akuntansi pemerintahan, khususnya mengenai akrual basis.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah memberikan masukan atau bahan pertimbangan dalam penerapan Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 agar dapat menerapkan akuntansi pemerintahan berbasis akrual secara maksimal. Penelitian ini juga diharapkan dapat meminimalkan kesalahan dalam penyusunan pelaporan keuangan dengan

Ahmad Zaidin, 2017

PENGARUH EFEKTIVITAS SIPKD , IMPLEMENTASI SAP BERBASIS AKRUAL DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

adanya identifikasi kemungkinan kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam menerapkan basis akrual. Diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji kembali mengenai pengaruh efektivitas SIPKD, Implementasi SAP berbasis akrual dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Secara umum juga diharapkan kualitas dan kuantitas pelaporan keuangan dalam pemerintahan akan meningkat serta untuk kualitas laporan keuangan semakin baik.

Ahmad Zaidin, 2017

PENGARUH EFEKTIVITAS SIPKD , IMPLEMENTASI SAP BERBASIS AKRUAL DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu